



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

# **DAFTAR PERATURAN DIREKSI DALAM PROGRAM PERENCANAAN NASKAH DINAS ARAHAN TAHUN 2024**



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



# Daftar Peraturan Direksi Dalam Program Perencanaan Naskah Dinas Arahan Tahun 2024

| No | Rancangan Peraturan Direksi                                                                                                                                  | UKPF Pengaju                             | Target 2024 |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|    |                                                                                                                                                              |                                          | Penetapan   | Pembahasan |
| 1. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan                                  | Strategi Perencanaan dan Pengembangan TI | v           |            |
| 2. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan                                           |                                          | v           |            |
| 3. | Perubahan Peraturan Direksi No. 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Data dan informasi                                                                 | Manajemen Data dan Informasi             | v           |            |
| 4. | Perubahan Peraturan Direksi No. 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan                                                            | Manajemen Iuran                          |             | v          |
| 5. | Perubahan Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan | Perluasan dan Kepatuhan Peserta          | v           |            |
| 6. | Peraturan Direksi tentang Kodifikasi Peraturan Direksi tentang Pengawasan dan Pemeriksaan/Audit Internal                                                     | Satuan Pengawasan internal               |             | v          |
| 7. | Peraturan Direksi tentang Penjaminan Alat Bantu Kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan                                                                     | Kebijakan Penjaminan Manfaat             | v           |            |

| No  | Rancangan Peraturan Direksi                                                                                                    | UKPF Pengaju                   | Target 2024 |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|
|     |                                                                                                                                |                                | Penetapan   | Pembahasan |
| 8.  | Pencabutan Peraturan Direksi No. 83 Tahun 2020 tentang Kodasi BPJS dan DJS Kesehatan                                           | Akuntansi                      | v           |            |
| 9.  | Peraturan Direksi tentang Mekanisme Penentuan Besaran Alokasi Surplus                                                          |                                | v           |            |
| 10. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Akuntansi Keuangan BPJS dan DJS Kesehatan                                                    |                                | v           |            |
| 11. | Peraturan Direksi tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Keuangan BPJS dan DJS Kesehatan                                            |                                | v           |            |
| 12. | Peraturan Direksi tentang Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan Piutang BPJS Kesehatan                                     |                                |             | v          |
| 13. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Sistem Pembelajaran Terintegrasi                                                             | Corporate University           |             | v          |
| 14. | Peraturan Direksi tentang Beasiswa, Pemberian Bantuan, Dan Izin Pendidikan Tinggi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan |                                |             | v          |
| 15. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Hubungan Antar Lembaga                                                                       | HAL dan Regulasi               | v           |            |
| 16. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan                        | Sumber Sarana Umum<br>Daya dan |             | v          |
| 17. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Perencanaan Bangunan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan                     |                                |             | v          |
| 18. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Pekerja Alih Daya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan                   |                                |             | v          |
| 19. | Peraturan Direksi tentang Penyediaan Perangkat Pendukung Operasional Kerja                                                     |                                | v           |            |
| 20. | Peraturan Direksi tentang Penyediaan Rumah Tinggal bagi Pimpinan di Lingkungan BPJS Kesehatan                                  |                                | v           |            |

| No  | Rancangan Peraturan Direksi                                                                                                                | UKPF Pengaju                               | Target 2024 |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|
|     |                                                                                                                                            |                                            | Penetapan   | Pembahasan |
| 21. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Kepatuhan Internal BPJS Kesehatan                                                            | Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan Internal |             | v          |
| 22. | Perubahan Peraturan Direksi No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Kode Etik                                                                     |                                            | v           |            |
| 23. | Peraturan Direksi tentang Pedoman GRC                                                                                                      |                                            |             | v          |
| 24. | Peraturan Direksi tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi                                                     |                                            | v           |            |
| 25. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik                                                                             | Sekretaris Badan                           |             | v          |
| 26. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Keprotokolan                                                                                             |                                            |             | v          |
| 27. | Peraturan Direksi tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi |                                            | v           |            |
| 28. | Peraturan Direksi tentang Penyediaan Alat Komunikasi dan Alat Penunjang Kerja Bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan               |                                            | v           |            |
| 29. | Peraturan Direksi tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan                     |                                            | v           |            |
| 30. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan                                                                                |                                            |             | v          |
| 31. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Manajemen Rapat                                                                                          |                                            |             | v          |
| 32. | Peraturan Direksi tentang Pengelolaan Perubahan                                                                                            | Manajemen SDM                              | v           |            |
| 33. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Perpajakan                                                                                               | Treasury dan Investasi                     | v           |            |
| 34. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Kebijakan Investasi Aset DJS dan Aset BPJS Kesehatan                                                     |                                            | v           |            |
| 35. | Peraturan Direksi tentang Manajemen Mutu Layanan Program Jaminan Kesehatan                                                                 | Manajemen Mutu Layanan                     |             | v          |
| 36. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Kehumasan                                                                                                | Komunikasi Organisasi                      | v           |            |

| No  | Rancangan Peraturan Direksi                                                       | UKPF Pengaju                                     | Target 2024 |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|
|     |                                                                                   |                                                  | Penetapan   | Pembahasan |
| 37. | Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Mutu Layanan di Fasilitas Kesehatan | Manajemen Mutu dan Kerjasama Fasilitas Kesehatan |             | v          |

DIREKTUR KEPATUHAN DAN HUBUNGAN  
ANTAR LEMBAGA  
BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, 4

  
MUNDIHARNO